

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Hubungan secara umum tentang Islam dan politik dimanifestasikan kedalam suatu sistem yang utuh yang disebut dengan negara merupakan sebuah fenomena yang selalu menarik untuk dikaji. Selama ini Islam dan politik dikesankan oleh dua paradoks, yakni Islam dan politik (negara) adalah satu kesatuan yang utuh, karena Islam sebagai agama yang bersifat integratif.

Sementara yang lain menyebut Islam dan politik (negara) tidak terkait, baik secara politik maupun hukum, karena Islam sebagaimana agama lainnya hanya berurusan dengan persoalan pribadi (personal), sedangkan politik (negara) merupakan urusan kolektif atau urusan publik. Hubungan Islam yang demikian seringkali menyulitkan para aktornya mengartikulasikan dirinya dalam dunia politik praktis, akibatnya muncul berbagai problem aktual dan kontekstual yang berkaitan dengan pemahaman atas keutuhan makna doktrinal.<sup>1</sup>

Konsep penyatuan agama dan negara (politik) dalam Islam sebenarnya terbentuk tidak lama setelah Nabi Muhammad SAW wafat dan teralisasi ketika kekuasaan dinasti menjadi sistem politik yang berkembang dalam Islam pada gilirannya relasi agama dan negara selalu menjadi persoalan yang tidak akan pernah habis-habisnya diperdebatkan oleh sejumlah intelektual atau elit politiknya.

---

<sup>1</sup> Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern: Teori, Fakta, dan Aksi Sosial*, (Kencana: Jakarta, 2010), hlm. 90

Jika menelaah sejarah Islam secara mendalam, sesungguhnya perdebatan tentang relasi Islam dan politik sudah berlangsung di antara para pemikir politik Islam yang berlandaskan dari Al-Quran dan Sunnah. Realitas memang menunjukkan bahwa isu ini menjadi salah satu isu hangat dan diskursif. Tak kurang ibn Abi Rabi', ibn Taimiyah, Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ikhwan Al-Shafa, dan ibn Khaldun memperdebatkan isu ini dalam konteks politik yang berlangsung saat itu.<sup>2</sup> Pandangan penyatuan agama dan politik didasarkan pada pernyataan Al-Quran. Diantaranya mengenai perlunya mematuhi Allah, Rasul-Nya dan *ulil amri* atau pemimpin, sebagaimana firman Allah berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah taatilah rasul-Nya dan ulil amri (pemerintahan) di antara kamu” (QS. 4: An-Nisa: 59).<sup>3</sup>

“Dan apabila datang kepada mereka menyerahkannya kepada rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (diantaramu)” (QS. 4: An-Nisa: 83).<sup>4</sup>

Sumbangan pemikiran dari ide yang menggambarkan hubungan antara agama (Islam) dan (politik) negara dari tokoh-tokoh muslim itu sendiri merupakan sebuah respons yang lahir atas kondisi sosial yang di hadapi pada masa itu, pemikiran politik Islam memberikan corak intelektual yang memahami dari sudut pandang yang berbeda tentang Islam dan politik.

Dalam kaitan hubungan antara Islam dengan realitas sosial yaitu politik, tentu akan menimbulkan beragam argumentasi dan corak pemikiran yang

---

<sup>2</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasa: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Erlangga: Jakarta, 2008), hlm. 76

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *An Nur Al Qur'an dan Terjemahannya*, (CV Fokusmedia, Yayasan Assalam International Indonesia: Bandung, 2010), hlm. 87

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 91

berbeda-beda. Salah satu misalnya argumentasi bahwa Islam adalah sebuah totalitas yang padu. Sehingga Islam tidak hanya mengenal ritual atau ritus bahkan lebih khusus lagi, Islam tidak mengenal dinding pemisah antara yang bersifat spiritual dan temporal. Sebaliknya, Islam memberikan panduan bagi setiap aspek kehidupan.<sup>5</sup> Atau dalam bahasa lainnya, dengan istilah tiga “d”, Islam adalah *din* (agama), *dunya* (dunia) dan *daulah* (pemerintahan). Sebagaimana Nazir Ayubi katakan:

*“A Sizeable group believes in the complete and holistic nature of revealed Islam so that, according to the them, it encompasses the three famous “ds” (din, religion; dunya, life and dawla, state,)”....*

*“Typical of the first trend is, for exemple, the distinguished Islamic writer Yusuf al-Qardawi. He maintains that Islam is an integrated totality that offers a solution to all problems of life. Is has to be accepted in its entirety, and to be applied to the family, to the economy and to politics”<sup>6</sup>*

Dalam buku Fiqh Siyasa, Doktrin dan pemikiran politik Islam yang ditulis oleh Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada membagikan tiga paradigma dalam melihat hubungan Islam dan politik. *Pertama*, paradigma bersatunya agama dan negara (*integrated paradigm*). Yakni pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan Ilahi (*divine sovereignty*) karena kedaulatan itu berada di tangan Tuhan. Bersatunya agama dan negara secara jelas dapat ditemukan pada

---

<sup>5</sup> Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, dalam Jurnal Prisma, No. 5-1995, hlm. 6

<sup>6</sup> Nazir N. Ayubi, *Political Islam Religion and Politics in the Arab World*, London and New York: Rounledge, 1991, 48. Menjelaskan bahwa cukup besar golongan yang percaya bahwa Islam itu diungkapkan secara komplit dan mencakup keseluruhan, menurut mereka, Islam itu meliputi tiga yang dikenal dengan (agama, dunya dan negara)..... Tren pertama, tokohnya adalah Yusuf al-Qardawi. Dia berpendapat bahwa Islam adalah totalitas terpadu yang menawarkan solusi untuk semua masalah hidup, itu harus diterima secara keseluruhan, dan diterapkan untuk keluarga, untuk ekonomi serta politik. kepadanya, selanjutnya, realisasi sebuah masyarakat Islam didasarkan pada pembentukan Negara Islam, yaitu sebuah “negara ideologis” berdasarkan ajaran Islam yang komprehensif

*landscape* pemikiran politik kelompok Syi'ah yang memiliki teori imamah dengan konsep *ismah*-nya.<sup>7</sup>

Paradigma *kedua*, memandang agama dan negara berhubungan secara simbiotik (*symbiotic paradigm*), yakni hubungan timbal-balik dan saling memerlukan. Dalam kaitan ini, negara dan agama sama-sama saling memerlukan. Di satu sisi, agama memerlukan negara agar dapat berkembang. Sebaliknya, negara memerlukan agama untuk mendapatkan bimbingan moral dan etika. Paradigma *ketiga* bersifat sekularistik (*secularistic paradigm*), paradigma ini menolak balik hubungan integralistik maupun hubungan simbiotik antara agama dan negara, dalam konteks Islam pandangan ini menolak pendasaran negara pada Islam atau menolak determinasi Islam dalam negara.<sup>8</sup>

Relasi agama dan negara berimplikasi pada polarisasi pendekatan dalam memandang agama (Islam) dan hubungannya dengan negara (politik), yakni skriptualistik, formalistik-substantifistik, dan sekularistik. Karena memang hampir di dalam tentang sejarahnya, pemikiran politik Islam akan selalu memperhadapkan dua pendekatan yang berbeda secara diametral.<sup>9</sup> Perdebatan panjang dalam memahami hubungan agama (Islam) dan negara (politik) memberikan semangat baru bagi para pemikir dan tokoh intelektual muslim dalam menyikapi hubungan agama dan negara dalam kehidupan bermasyarakat.

Corak pemikiran dan pandangan para pemikir muslim dalam menyikapi hubungan Islam dan politik tidak terlepas dari persentuhan dan interaksi dengan kebudayaan serta peradaban dunia modern (Barat). Salah satu konsep dan gagasan

---

<sup>7</sup> Mujar Ibnu Syarif., *Loc.cit*

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 89

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 90



politik barat yang cukup mempengaruhi corak pemikir muslim adalah demokrasi. Demokrasi telah menjadi isu penting kehidupan masyarakat modern saat ini. Hampir tidak ada satu pun negara di dunia ini yang tidak merespons ide-ide ini bahkan oleh negara-negara muslim.

Meskipun model pemerintahan demokrasi juga telah banyak di adopsi dan dipraktikkan oleh negara-negara muslim, termasuk Indonesia, pro dan kontra di kalangan ulama dan pemikir Islam tentang demokrasi tetap berlangsung. Secara umum, kontroversi itu dapat dikategorikan dalam tiga kelompok: *Pertama*, kelompok yang mendukung sistem demokrasi dan menerimanya apa adanya, *Kedua*, kelompok yang mendukung sistem demokrasi dengan catatan dan syarat tertentu dan *Ketiga*, kelompok yang sama sekali menolak demokrasi.<sup>10</sup> Persinggungan antara pemikiran Islam dan Barat dalam memahami agama dan negara telah membawa Indonesia pada kondisi politik dewasa ini.

Demokrasi yang ada di Indonesia dapat dipahami sebagai suatu mekanisme dan cita-cita hidup berkelompok dalam organisasi negara yang menurut undang-undang dasar 1945 disebut sebagai kerakyatan yang berdasarkan nilai-nilai pancasila. Dalam memahami falsafah pancasila, pancasila tidak hanya mengandung nilai-nilai politik, ekonomi, sosial, dan budaya, namun juga mengandung nilai religius. Hal ini berarti bahwa nilai yang terkandung dalam pancasila meliputi tanggung jawab kemanusiaan dan sekaligus terhadap Tuhan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> A. Khudori Soleh, *Islam Tidak Sama Dengan Demokrasi*, Jurnal El-jadid, Pascasarjana UIN Malang, Vol. 3, No. 1

<sup>11</sup> M. Anis Sumaji, *Elit Muhammadiyah dan NU Dalam Menyikapi Pemilu 2014*, (Tesis Pascasarjana UMS, 2016), hlm. 5

Bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah sistem demokrasi adalah politik elektoral yakni pemilihan kepala negara, daerah dan legislatif yang merupakan sarat penting dalam sebuah sistem yang dianut demokrasi. Proses pemilihan presiden, kepala daerah serta legislatif sebagai sebuah sistem merupakan momentum yang sangat penting dari berbagai pihak, baik partai politik, elit partai politik, elemen di masyarakat, ormas bahkan elit ormas.

Momentum yang besar ini telah mendorong berbagai kalangan dan kelompok sosial untuk mengambil kesempatan politik dalam menyikapi kondisi sosial yang di hadapi dalam bingkai yang sama, dengan modus menjalankan serta mengimplementasikan nilai-nilai yang dipahami di setiap kelompok tersebut. Bahkan tidak banyak juga berbagai kelompok organisasi keagamaan pada khususnya, yang pada awalnya tidak serta-merta ikut dalam mengambil momentum politik dengan tetap menjalankan sikap netral organisasi “*khittah*” bahkan berubah haluan dan ikut serta dalam perpolitikan yang ada.

Dengan memberikan dukungan politik menjadi simpatisan partai atau hanya sekedar untuk memilih saat pemilu. Keputusan-keputusan yang mereka ambil tersebut merupakan suatu “*ijtihad politik*” mereka. Segala perihal yang bersangkutan dengan persoalan-persoalan keputusan politik dengan meminjam istilah yang di populerkan oleh M. Amien Rais *low politics* atau *partisan politics* dengan jelas menunjukkan Tarbiyah sebagaimana organisasi sosial-keagamaan lainnya tidak bisa jauh dari kehidupan politik.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Zuly Qodir, Achmad Nurmandi, M. Nurul Yamin, *Ijtihad Politik Muhammadiyah : Politik Sebagai Amal Usaha*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2015), hlm. 7 (PDF)

Seperti yang digambarkan di atas kelompok keagamaan yang disebutkan dapat terlihat pada beberapa organisasi besar di Indonesia. Muhammadiyah, NU (Nahdlatul Ulama) bahkan organisasi yang terlahir dari kalangan lokal di Indonesia yang berbasis pesantren, pinggiran kota serta desa yakni Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Organisasi-organisasi tersebut telah berperan aktif dalam pergolakan perpolitikan di Indonesia dari daerah hingga pusat dan mewarnai wajah politik Islam di Indonesia. Gerakan keagamaan hingga varian elit-elit kelompok keagamaan tersebut secara tidak langsung telah membawa angin segar bagi perkembangan demokrasi.

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modern dengan slogan gerakan pencerahan menuju Indonesia berkemajuan mempunyai peran yang sangat strategis dalam dinamika politik pada arena politik elektoral. Elit Muhammadiyah pada era ini masuk pada pusaran politik praktis yang deras. Sehingga, terjadilah benturan hebat antara kepentingan elit Muhammadiyah dengan pola gerakan Muhammadiyah yang tidak berpolitik praktis. Adanya benturan tersebut, menjadikan elit Muhammadiyah pada akhirnya mempunyai sikap yang plural. Banyak muncul perbedaan sikap yang tidak lagi mempunyai pola klasik antar sub kultur tradisional melawan modernis. Akan tetapi, masalah yang muncul lebih kompleks karena sub kultur itu sendiri terpecah antara kelompok substansialis dan kelompok formalis.<sup>13</sup>

Pada sisi yang lain, Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi massa terbesar di Indonesia juga masuk pada lingkaran dinamika politik nasional dan

---

<sup>13</sup> Sudarno Shobron, *Muhammadiyah dan NU dalam Pentas Politik Nasional*, (Muhammadiyah University Press: Surakarta), hlm. 168.

tidak bisa berlepas diri darinya. Nahdlatul Ulama adalah organisasi sosial keagamaan *jamiyyah diniyyah-ijtimaiyyah* terbesar di negeri ini yang sebenarnya lebih fokus pada persoalan-persoalan kehidupan sosial keagamaan para warganya. Secara historis, pada masa orde lama NU beralih tujuan menjelma menjadi sebuah partai politik sebagai wujud kekecewaan terhadap kelompok “modernis” yang lebih banyak mendominasi di tubuh partai Masyumi. Di sinilah NU menjadi salah satu organisasi yang berjalan dalam koridor sebagai organisasi sosial keagamaan yang ikut mewarnai kehidupan politik bangsa Indonesia. Perjalanan politik praktis NU berganti haluan ketika pada Mukhtar di Situbondo, amanat Mukhtar pada saat itu merekomendasikan NU kembali kepada *khittah*-nya menjadi organisasi sosial keagamaan serta mempunyai ruang gerak pada masalah-masalah keumatan. Hal tersebut terus berjalan sampai sekarang.

Sementara Persatuan Tarbiyah Islamiyah juga tidak bisa dilepaskan dari pusaran organisasi yang bergerak di bidang sosial dan keagamaan namun juga di dunia politik praktis. Terbentuknya gerakan-gerakan politik elit Persatuan Tarbiyah Islamiyah ini tidak terlepas dari aspek kesejarahan organisasi ini. Dimana organisasi ini diawali perkembangannya telah menjadi organisasi kepartaian, yang secara aklamasi menyetujui untuk meningkatkan perjuangan jama'ah Persatuan Tarbiyah Islamiyah dan organisasi Islam ini dijadikan partai politik dengan nama Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (P.I PERTI) yang



diterima baik oleh Mukhtamar ke- IV pada tanggal 24-26 Desember 1945 di Bukittinggi.<sup>14</sup>

Namun, eksistensi organisasi ini dalam gerakan politiknya hanya bertahan sampai tahun 1970-an selepas kemelut panjang yang menimpa internal Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Sehingga organisasi ini mendeklarasikan diri untuk melepaskan baju politiknya dan kembali ke *khittah* perjuangannya yaitu di bidang pendidikan, sosial dan dakwah yang diputuskan pada Munas ke-VI Tarbiyah tahun 1999 di Hotel Jaya Raya Cisarua Puncak.<sup>15</sup>

Organisasi ini mengambil keputusan yang penting yaitu “untuk tidak berafiliasi lagi dengan partai politik”. Dalam hal ini Tarbiyah dideklarasikan sebagai organisasi massa keagamaan yang independen. Pada kenyataannya meskipun secara organisatoris Persatuan Tarbiyah Islamiyah telah menyatakan ke independensiannya tidak lagi menjadi organisasi yang dekat dengan politik. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwasanya para elit-elit Persatuan Tarbiyah Islamiyah masih memanfaatkan peluang politik di pusran politik elektoral. Akibatnya, elit-elit Tarbiyah yang bersangkutan mengalami deviasi sikap terhadap *khittah* organisasi.

Elit-elit Persatuan Tarbiyah Islamiyah pada pasca Orde Baru, masih mendapatkan fasilitas untuk dicalonkan menjadi anggota legislatif di DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten atau Kota. Mereka yang terlibat dengan partai

---

<sup>14</sup> Nelmawarni, *Persatuan Tarbiyah Islamiyah: Dari Organisasi Sosial Keagamaan ke Partai Politik*, (Imam Bonjol Press: Padang, 2013), hlm. 137.

<sup>15</sup> *Khittah* diartikan sebagai sebuah jalan lurus yang munculnya didasarkan pada fakta-fakta sosio-politik. lihat, Anzar Abdullah. *Nahdatul Ulama and The Khittah Revitalization: A Futuristic Critical Reflection for the Largest Islamic Organization in Indonesia*. (Tawarikh-International Journal for Historical Studies, Vol. 2. No. 1: 2011)., hlm. 96.

politik dan dekat dengan politik praktis secara tidak langsung telah menarik massa Persatuan Tarbiyah Islamiyah untuk menyalurkan aspirasi politik mereka ke partai politik dan mendukung calon tertentu.<sup>16</sup>

Dengan terbentuknya sistem yang telah melanggengkan hubungan harmonis antara elit Persatuan Tarbiyah Islamiyah dengan partai politik bahkan masuk pusaran politik praktis. Elit non partisan atau elit informal seperti akademisi dan birokrat juga memiliki kepentingan untuk menjaga eksistensi organisasi ini agar jauh dari kepentingan-kepentingan politik serta tetap menjaga kenetralan organisasi. Pada perkembangannya, pasca Munas ke-VI Tahun 1999 organisasi ini telah melalui kiprah politik pada tubuh organisasi tersebut, misalkan pada setiap memasuki musim politik elektoral Pilpres, Pilkada, dan Pileg kecenderungan organisasi ini didekati berbagai kepentingan hanya untuk mendapatkan suara dari PB dan DPD Persatuan Tarbiyah Islamiyah.

Yang menarik adalah pada kepengurusan DPD Persatuan Tarbiyah Islamiyah Sumatera Barat periode 2012-2017, yang dipimpin oleh H. Boy Lestari Dt. Palindih yang terpilih kembali menjadi ketua DPD Persatuan Tarbiyah Islamiyah sebanyak dua periode, karena pada periode inilah tepatnya pada pelaksanaan politik elektoral Pemilukada serentak 2015, pergeseran pola strategi perjuangan *khittah* DPD Persatuan Tarbiyah Islamiyah Sumatera Barat sangat terlihat jelas di ruang publik yakni *khittah* pendidikan, dakwah islamiyah dan *khittah* sosial kemasyarakatan.

---

<sup>16</sup> Hardi Putra Wirman, *Organisasi Keagamaan dan Politik : Studi kasus Peran Politik Organisasi Muhammadiyah dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Sumatera Barat Pasca Orde Baru*, (Jurnal STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi), hlm. 3

## 1.2 Rumusan Masalah

Berkaca kembali ke masa silam, masa dimana Tarbiyah Islamiyah didirikan adalah keniscayaan untuk menjelaskan bahwa *khittah* Tarbiyah Islamiyah adalah bergerak di bidang pendidikan, dakwah dan sosial yang menganut paham *Ahlussunnah wal Jama'ah* dalam i'tikad yang bermazhab Imam Syafi'i *Rahimakumullah* dalam Syariat.<sup>17</sup> Namun penerapan dan interpretasi terhadapnya mengalami pasang surut menyimpang dan bahkan melanggar dengan sangat terang-terangan. Hal itu ditandai dengan perilaku politik elit Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang gemar mencari dukungan finansial dengan cara menjual “nama”, kekuatan, dan massa jama'ah Tarbiyah Islamiyah. Dengan membawa tokoh politik dan gemar melakukan dukung-mendukung atas satu partai politik adalah perilaku politik elit Persatuan Tarbiyah Islamiyah pasca *khittah* 1969.<sup>18</sup>

Pada keputusan Munas ke-VI Tarbiyah tahun 1999 di Hotel Jaya Raya Cisarua. Hal tersebut merupakan sebuah keputusan formal yang dikeluarkan atas dasar kemelut panjang di tubuh internal Tarbiyah, serta sikap tegas demi menyelamatkan organisasi dari kemerosotan semangat perjuangan dakwah. Persatuan Tarbiyah Islamiyah sebagai organisasi sosial keagamaan dengan *khittah*-nya pendidikan, dakwah islamiyah dan sosial kemasyarakatan, seharusnya di pegang teguh oleh organisasi baik jama'ah maupun elit yang menduduki struktural di Tarbiyah itu sendiri. Sesuai dengan AD dan ART Organisasi:

---

<sup>17</sup> H. Hasan Zaini, Muhammad Kosim, Aldomi Putra, *Prinsip dan Jati Diri Persatuan Tarbiyah Islamiyah: Ber I'tiqad Ahlussunnah Wal Jama'ah dan Mazhab Syafi'i*, Mukadimah AD dan ART Persatuan Tarbiyah Islamiyah, hlm. 159

<sup>18</sup> Muhammad Shalihin, *Animal Spirit dan Politik Khittah*, Kamis 2 Juli 2015, (<http://tarbijahislamiyah.com/>), di akses pada 26 Juni 2016

“Organisasi ini bersifat sosial kemasyarakatan, keagamaan yang bergerak dalam bidang pendidikan, dakwah Islamiyah dan Amal Sosial.”<sup>19</sup>

Di dalam arena politik, *khittah* tersebut seharusnya diterjemahkan sebagai netralitas dalam mengambil sikap politik sehingga sejarah kelam organisasi pada masa lampau tidak terulang kembali dikarenakan putusan sikap politik yang berbeda. Namun sejarah singkat Persatuan Tarbiyah Islamiyah pasca Munas tidak berujung manis sesuai yang diharapkan *khittah* Tarbiyah, *khittah* sebagai sikap netralitas di pahami dengan berbagai sudut pandang oleh para jama'ah dan elit Tarbiyah pada khususnya.

Dalam merespons isu-isu politik, para elit formal yang memiliki “legitimasi” organisasi dan elit informal yang memiliki massa tertentu mengalami perbedaan dan silang pendapat. Isu-isu politik elektoral yang muncul kepermukaan di Sumatera Barat telah menggiring elit dalam memanfaatkan momentum dan mendukung salah satu pasangan calon. Di sisi lain, kalangan elit informal (elit non partisan) dalam menyikapi isu politik tetap menjaga kenetralitasan organisasi dan berdiri di atas *khittah* organisasi yang digolongkan oleh tokoh akademisi, birokrat dan wartawan yang memiliki pengaruh tersendiri.<sup>20</sup>

Dalam menghadapi dinamika kehidupan politik khusus yang berkaitan dengan Pemilu dan Pemilukada yang selalu berlangsung reguler lima tahunan hendaknya setiap anggota serta elit Tarbiyah berpartisipasi sebagai pemilih kritis, cerdas, dan menjunjung tinggi akhlak mulia, tidak melibatkan organisasi dalam percaturan politik praktis.

---

<sup>19</sup> H. Hasan Zaini, dkk., *Op.cit.*, hlm. 161

<sup>20</sup> Hardi Putra Wirman., *Op.cit.*, hlm. 3



Tarbiyah dengan ideologi gerakannya melakukan *ijtihad* politik lebih memilih strategi perjuangan pembinaan masyarakat yang mengabdikan kepada agama, bangsa dan negara Indonesia dan tidak menempuh perjuangan politik praktis.<sup>21</sup> Tarbiyah dengan segala dinamikanya telah mengalami pergeseran garis perjuangan dari perjuangan *khittah* dan *ijtihad* dakwahnya ke perjuangan *ijtihad* politik yang dekat dengan politik praktis serta mengenyampingkan tujuan awal didirikan Tarbiyah.

Pengalaman menunjukkan adanya pergeseran perjuangan Tarbiyah terdapat kecenderungan pimpinan Tarbiyah atau para tokohnya memberikan dukungan politik kepada calon tertentu, dengan resiko menimbulkan pro dan kontra di tubuh internal Tarbiyah. Fakta seperti ini menjadi menarik untuk diteliti bahwa elit dalam tubuh internal Tarbiyah sendiri mengalami pergeseran perjuangan dari *khittah* organisasi. Sehingga, bagaimana bentuk sikap dan motivasi para elit tersebut dalam memberikan partisipasi politik selalu mengalami pemutakhiran sikap politiknya.

Masih dalam kasus yang sama, keterlibatan politik yang ditampilkan oleh kalangan elit Persatuan Tarbiyah Islamiyah telah membangun suasana politik yang secara tidak langsung membawa simpatisan jama'ah Tarbiyah Islamiyah ikut serta dalam kancah politik di Sumatera Barat. Seperti adanya jama'ah yang duduk di kursi legislatif, sama halnya juga yang terlihat pada pilpres dan pilkada.<sup>22</sup>

Pada Pilpres tahun 2009 misalnya Persatuan Tarbiyah Islamiyah mengambil sikap secara politis untuk mendukung salah satu pasangan calon

<sup>21</sup> H. Hasan Zaini, dkk., *Op.cit.*, hlm. 160

<sup>22</sup> Wawancara dengan Benni Kharisma Arrasuli, Alumni MTI Canduang dan Jama'ah Tarbiyah Islamiyah Sumatera Barat, Gedung Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang 15 April 2016

Presiden secara organisatoris yakni pasangan no urut 2 SBY-Boediono dan sikap itu diambil kembali pada pilpres 2014 dengan mendukung Prabowo-Hatta oleh Pengurus Besar (PB) Tarbiyah Islamiyah.<sup>23</sup> Tidak hanya sampai di sana dukungan tersebut mengalir di tingkat pengurus daerah dimana pimpinan DPD Tarbiyah H. Boy Lestari dt. Palindih masuk dalam jajaran dewan penasehat tim kampanye Prabowo-Hatta dan beserta tokoh-tokoh lainnya.<sup>24</sup>

Tidak hanya sebatas Pilpres, tetapi juga pada Pemilukada serentak yang dilaksanakan pada tahun 2015 lalu, Persatuan Tarbiyah Islamiyah juga memberikan dukungan politik kepada salah satu pasangan calon gubernur Sumatera Barat Muslim Kasim-Fauzi Bahar.<sup>25</sup> Kemudian Tarbiyah juga memberikan gelar anggota kehormatan kepada calon wakil gubernur.<sup>26</sup>

Sebenarnya libido politik yang menggebu itu telah menjadi isu umum di tengah publik terkhusus di kalangan jama'ah Tarbiyah itu sendiri. Sejak salah satu kandidat dinobatkan sebagai anggota kehormatan Tarbiyah Islamiyah yakni Fauzi Bahar pada Milad Nasional ke-87 Tarbiyah, 11 Mei 2015 di Bukittinggi. Dengan mendeklarasikan diri baik dalam bentuk lisan bahkan dalam bentuk spanduk dan *backdrop* yang dipajang foto pimpinan partai dan kandidat pasangan calon tersebut.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> Amri Amrullah. *Dukungan Umat Islam ke Prabowo-Hatta Terus Mengalir*, Rabu 28 Mei 2014, (<http://www.republika.co.id/>), di akses 27 Juni 2016

<sup>24</sup> Harian Umum Haluan, *Dukungan Terhadap Capres: Tokoh Sumbar dan Perantau 'Pecah'*, edisi 225, Tahun ke 65 Selasa 20 September 2014, hlm depan.

<sup>25</sup> Harian Pagi Padang Ekspres, *Filosofi ABS-SBK Harus diimplementasikan*, edisi Kamis 15 Oktober 2015, hlm. 4

<sup>26</sup> Harian Singgalang, (Khairul Fahmi), *Mengangkangi Khittah Tarbiyah*, Jum'at 16 Oktober 2015

<sup>27</sup> Harian Padang Ekspres, (Firdaus Diezo), *Lapak Tarbiyah*, edisi Sabtu 17 Oktober 2015, (<http://www.koran.padek.com/>), di akses 5 Oktober 2016

Hal itulah yang melahirkan beberapa tuntutan dan penolakan yang berujung pada penanda tangan petisi yang lahir dari kalangan jama'ah, atau elit informal Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Adapun poin tuntutan dan penolakan terhadap PB dan DPD Tarbiyah Islamiyah Sumatera Barat ialah:

1. Pemberian warga kehormatan kepada Drs. Fauzi Bahar oleh PB Tarbiyah Islamiyah.
2. Dijadikannya Persatuan Tarbiyah Islamiyah sebagai komoditas politik oleh PB dan DPD Persatuan Tarbiyah Islamiyah Sumatera Barat.
3. Pengkhianatan PB dan DPD Persatuan Tarbiyah Islamiyah terhadap *khittah* Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang diserukan oleh syekh Sulaiman Ar-Rasully (pendidikan, dakwah dan sosial).
4. Ketidakpedulian PB dan DPD Persatuan Tarbiyah Islamiyah Sumatera Barat terhadap eksistensi Madrasah Tarbiyah Islamiyah yang mulai tergerus oleh zaman dan akhirnya tenggelam.<sup>28</sup>

Munculnya suatu petisi dalam bentuk pemboikotan kepengurusan PB dan DPD Tarbiyah Sumatera Barat dari sebagian kalangan pemuda Tarbiyah Islamiyah di Sumatera Barat yang memberikan anggapan munculnya petisi tersebut merupakan sikap dan perilaku elit yang telah menyimpang dari tata nilai norma yang telah digariskan oleh agama dan juga oleh para ulama pendirinya atau ulama pendahulunya yang lebih dikenal dengan *khittah* perjuangan Tarbiyah.<sup>29</sup>

Keterkaitan hubungan *khittah* Tarbiyah dan politik ini menjadi hal yang menarik ketika menjadi isu pembicaraan di kalangan akademisi muslim di Sumatera Barat. Kondisi sosial politik dewasa ini kemudian memunculkan asumsi yang berkembang di masyarakat dalam memandang figure elit keagamaan ketika mereka ikut terjun keranah politik yang syarat dengan intrik dan konflik

---

<sup>28</sup> Petisi, *Mempetisi Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PB Tarbiyah Islamiyah dan DPD Persatuan Tarbiyah Islamiyah)*, (<https://www.change.org/>), di akses 12 Januari 2016

<sup>29</sup> Ali Wardana, *Tarbiyah Islamiyah Dan Kritik Sosial*, edisi kamis 6 Juli 2015, (<http://tarbijahislamijah.com/>), di akses 5 Oktober 2016.

didalamnya. Dalam dunia politik, terkadang kita sangat sulit untuk membedakan siapa datang dan siapa yang menjadi wayang. Karena bisa saja seseorang tampil sebagai wayang, namun di lain waktu, bisa juga muncul sebagai dalang, alias profokator.

Jika dunia politik sudah sedemikian rupa, persoalannya adalah; layakkah jika seorang elit keagamaan ikut berkiprah di dunia yang citranya seperti itu? Sementara pandangan masyarakat secara umum terhadap seorang kiai ataupun ulama justru sebaliknya. Bagi mereka yang sedang gandrung politik, sudah pasti menjawab harus, dalilnya, justru karena politik sedang kotor, kehadirannya diharapkan mampu menayamarkan wacana politik baru kontemporer dan meniupkan arah baru pemikiran politik.<sup>30</sup> Hubungan *khittah* Tarbiyah dan politik yang demikian memiliki kecenderungan yang sama yakni elit keagamaan yaitu elit Tarbiyah memainkan peran di dunia politik praktis di Sumatera Barat.

Dimana PB Persatuan Tarbiyah Islamiyah dipimpin oleh Drs. H. Basri Bernanda, MBA. Sedangkan DPD Persatuan Tarbiyah Islamiyah Sumatera Barat dipimpin oleh Syekh Syahibul Fadhillah H. Boy Lestari Dt. Palindih. Lahirnya petisi dari kalangan elit informal merupakan bentuk konkret dari adanya dinamika dan faksi politik elit dalam menyikapi isu politik elektoral di bawah payung *khittah* Persatuan Tarbiyah Islamiyah.

Hal ini menunjukkan bahwa adanya pergeseran perjuangan dakwah Tarbiyah, dengan ideologi *khittah* gerakannya melakukan *ijtihad* strategi

---

<sup>30</sup> Dalam konteks keindonesiaan, upaya pembangunan masyarakat dalam politik dikenal dengan istilah, "Dakwah Pembangunan". Sebuah upaya meningkatkan kehidupan beragama, berpolitik, dan sekaligus meningkatkan kehidupan berbangsa, membina dan mengembangkan wawasan masyarakat. Lihat Jurnal Karsa Abdurahman Fenomena Kiai (Ulama) Dalam Dinamika Politik: Antara Gerakan Moral dan Politik, Vol. XV No. 1 April 2009, hlm. 29.



perjuangan pembinaan masyarakat sosial keagamaan serta pendidikan, dan lebih cenderung menempuh perjuangan politik-praktis dalam ranah kekuasaan-negara. *Khittah* Tarbiyah dan *ijtihad* politik elit yang menjadikan dilema dalam pengambilan sikap politik sehingga hal tersebut menarik untuk diteliti. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa DPD Persatuan Tarbiyah Islamiyah Sumatera Barat lebih cenderung bergerak di ranah politik praktis ketimbang menjalankan *khittah* perjuangan Tarbiyah? Yang menjadi unit analisisnya ialah setiap individu elit DPD Persatuan Tarbiyah Islamiyah Sumatera Barat dan pertanyaan penelitiannya adalah;

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi triologi perjuangan *khittah* oleh DPD Persatuan Tarbiyah Islamiyah Sumatera Barat?
2. Mengapa terjadi dukungan politik elit DPD Persatuan Tarbiyah Islamiyah terhadap kandidat pasangan calon kepala daerah pada Pilkada serentak Sumatera Barat tahun 2015 ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang peneliti susun, maka penelitian ini bertujuan :

1. Mendeskripsikan pelaksanaan triologi *khittah* Tarbiyah di tengah kemerosotan perjuangan semangat pendidikan, dakwah islamiyah dan sosial kemasyarakatan.
2. Mengetahui, menganalisa dan mengidentifikasi apa yang melatar belakangi dukungan politik praktis elit DPD Tarbiyah terhadap kandidat pasangan calon Pilkada serentak di tahun 2015.

#### 1.4 Signifikan Penelitian

Seiring dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pengetahuan secara umum, khususnya dalam kajian politik Islam.

1. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan akan membuka cakrawala baru dalam ilmu politik, khususnya dalam memperkaya perbendaharaan pengetahuan dalam studi politik Islam.
2. Dan secara sosial, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif pandangan yang tetap objektif dalam menelaah permasalahan-permasalahan *ummat* dalam kehidupan politik khususnya yang berhubungan dengan *khittah* dan *ijtihad* politik.
3. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis kepada DPD Persatuan Tarbiyah Islamiyah dalam menjalankan semangat perjuangan melalui *khittah* Tarbiyah yakni pendidikan, dakwah Islamiyah dan sosial kemasyarakatan.

